



RISALAH
SIDANG TAHUNAN DAN SIDANG BERSAMA MPR/DPR/DPD TAHUN 2022
DALAM RANGKA LAPORAN KINERJA LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

Hari	: Selasa
Tanggal	: 16 Agustus 2022
Tempat	: Gedung Nusantara MPR/DPR
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A
Sekretaris Rapat	: Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H
Acara	: Sidang Tahunan dan Sidang Bersama MPR/DPR/DPD RI
Agenda	: Laporan Kinerja Lembaga-lembaga Negara
Anggota Hadir	: 542 Anggota
Anggota Tidak Hadir	: 169 Anggota

JALANNYA RAPAT:

(RAPAT DIBUKA PUKUL 09.30 WIB)

MC (Dra. SARI NILA WARSONO)

Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI memasuki Ruang Rapat Paripurna.
Menyanyikan lagu Indonesia Raya.

MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA

MC (Dra. SARI NILA WARSONO)

Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua MPR RI.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.)

Saudara-saudara dan hadirin yang kami hormati, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah SWT., Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga para pahlawan bangsa yang telah mendahului kita mendapatkan tempat yang mulia di sisinya, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melanjutkan perjuangan ini. Mengheningkan cipta, dimulai.

MENGHENINGKAN CIPTA

MC (Dra. SARI NILA WARSONO)

Hadirin disilakan duduk kembali.

KETUA RAPAT (H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.)

Bismillahirrahmanirrahim, *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, *Om Swastiastu, Namu Buddhaya*, Salam Kebajikan.

- Yang kami hormati :
- Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo, beserta Ibu Iriana Joko Widodo;
- Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin, beserta Ibu Wury Ma'ruf Amin;
- Presiden Republik Indonesia Kelima, Ibu Prof. Dr. (H.C.) Megawati Soekarnoputri;
- Wakil Presiden Republik Indonesia Keenam, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Try Sutrisno;
- Wakil Presiden Republik Indonesia Kesembilan, Bapak Dr. H. Hamzah Haz, M.A., Ph.D.
- Wakil Presiden Republik Indonesia Kespuluh dan Keduabelas, Bapak Drs. H.M. Jusuf Kalla;
- Wakil Presiden Republik Indonesia Kesebelas, Bapak Prof. Dr. Boediono;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. (H.C.) Puan Maharani;
- Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak La Nyala Mahmud Mattalitti;
- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Ir. Isma Yatun, C.S.F.A., C.Fr.A.;
- Ketua Mahkamah Agung, Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H, M.H.;
- Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.;
- Ketua Komisi Yudisial, Bapak Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.;
- Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
- Para Pimpinan Lembaga-lembaga Negara, Ketua KPK, KPU, Bawaslu, dan lain-lain.
- Yang kita banggakan para Ketua Umum Partai Politik;
 1. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Prof. Dr.(H.C.) Megawati Soekarnoputri
 2. Ketua Umum Partai Golkar, Dr. (H.C.) Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T.
 3. Ketua Umum Partai Gerindra, Letjen. TNI (Purn) H. Prabowo Subianto
 4. Ketua Umum Partai Nasdem, DR. (H.C.) Drs. Surya Dharma Paloh
 5. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si.
 6. Ketua Umum Partai Demokrat, Mayor Inf. (Purn.) H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A.
 7. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, H. Ahmad Syaikhu

8. Umum Partai Amanat Nasional, Dr. (H.C.) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
9. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Dr. (H.C.). Ir. H. Suharso Monoarfa, M.A.

- Para Anggota MPR, DPR, dan DPD;
- Yang Mulia para Duta Besar Negara Sahabat;
- Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
- Panglima TNI, KAPOLRI, Kepala BIN, Jaksa Agung Republik Indonesia;
- Seluruh masyarakat Diaspora Indonesia;
- Para insan pers, media cetak dan elektronik, dalam dan luar negeri;
- Para undangan, serta teristimewa, seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia, di mana pun anda berada.

Sesuai catatan daftar hadir yang disampaikan Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir 435 anggota dari 711 Anggota MPR, DPR, dan DPD yang telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Peraturan Tata Tertib MPR, dan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 254 ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPR, serta Pasal 264 ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka.

Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Sidang Paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, dengan agenda mendengarkan pidato Presiden, penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara, dan pidato kenegaraan dalam rangka peringatan hari ulang tahun Ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1 KALI

Sidang Majelis dan Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan, sebagai insan yang beriman, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Waa Ta'ala*, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan tugas konstitusional kita masing-masing, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Rasa syukur yang mendalam juga patut kita persembahkan, setelah lebih dari dua tahun dilanda pandemi *Covid-19*, berkat kerja keras Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa, kita dapat mengatasi pandemi dengan baik, kita bisa pulih lebih cepat, dan bangkit lebih kuat, sehingga pada hari ini, kita pun dapat melaksanakan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, dihadiri oleh seluruh Anggota MPR, DPR, DPD, serta undangan lainnya.

Untuk itu, izinkan kami selaku Pimpinan dan Anggota MPR, DPR, dan DPD menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo, Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin, serta seluruh Pimpinan Lembaga Negara, atas perkenannya hadir

memenuhi undangan kami, dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD.

Sebelum menyampaikan pidato pengantar Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (4) Tata Tertib MPR, ijin kami melaporkan, pada tanggal 30 Juni 2022, Saudara Yandri Susanto, S.Pt., telah mengucapkan sumpah sebagai Wakil Ketua MPR, menggantikan Saudara Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., yang mengundurkan diri karena mendapat kepercayaan dari Presiden Joko Widodo, untuk menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Pimpinan dan Anggota MPR mengucapkan terima kasih atas pengabdian Saudara Zulkifli Hasan di lembaga yang terhormat sebagai Ketua MPR masa jabatan 2014 – 2019, dan Wakil Ketua MPR masa jabatan 2019 – 2024.

Saudara-saudara sekalian Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya membuka sidang ini dengan dua bait pantun:

Ada burung di atas dahan, dahannya ada di pohon beringin,
saya ucapkan salam pembukaan, kepada semua para hadirin.
Agustus bulan kemerdekaan, Gotong royong menjadi kekuatan,
Agar Indonesia sukses menyongsong masa depan,
Jaga terus Persatuan dan Kesatuan.
MERDEKA!

Sidang Majelis dan Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan, esok hari bangsa Indonesia akan memasuki usianya yang ke-77 tahun. Sudah sepatutnya kita memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para pejuang bangsa yang telah mengorbankan tenaga, harta, bahkan jiwanya, sehingga sampailah kita kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa, mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Melalui sidang ini dan melalui mimbar ini, kami atas nama Pimpinan dan Anggota MPR, DPR, dan DPD, mengucapkan Dirgahayu ke-77 Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Dengan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, mari kita gelorakan semangat untuk mewujudkan tujuan Indonesia merdeka, yaitu menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur; serta melaksanakan amanah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua, setelah 77 tahun Indonesia merdeka, kita lahirkan generasi muda yang tangguh, unggul, bersatu, dan optimis, sehingga memiliki kesiapan untuk mengambil alih estafet kepemimpinan nasional, guna mewujudkan cita-cita bangsa menuju era Indonesia Emas 2045.

Sidang Majelis dan Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan, kondisi global saat ini semakin tidak menentu. Semua negara sedang berupaya keras memulihkan ekonominya pasca pandemi Covid-19. Namun, fase ini terganggu oleh dinamika global, seperti konflik Rusia-Ukraina, perang dagang dan teknologi Amerika Serikat-Tiongkok, ketegangan baru di Selat

Taiwan, serta disrupsi rantai pasok yang berimplikasi pada fluktuasi harga komoditas pangan dan energi.

Kenegarawanan Presiden Jokowi ditunjukkan, melalui pelaksanaan salah satu tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia, yaitu: ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Misi perdamaian Presiden, dengan mengunjungi Ukraina dan Rusia beberapa waktu yang lalu, patut kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Perang dengan alasan apa pun, selalu membawa petaka, kehancuran, dan kesengsaraan, menghancurkan peradaban yang telah dibangun berabad-abad lamanya. Membawa krisis kemanusiaan, krisis ekonomi, krisis pangan, dan krisis energi. Menurut Badan Pengungsi PBB, UNHCR, dalam kurun waktu kurang dari dua bulan sejak pasukan Rusia memulai perang di Ukraina, sebanyak 5 juta warga Ukraina telah meninggalkan negara mereka. Warga Ukraina kini merupakan kelompok pengungsi kedua terbesar di dunia, setelah pengungsi Suriah yang jumlahnya mencapai 6,8 juta.

Perang antara Rusia dan Ukraina, juga telah menyebabkan sekitar 7,1 juta warga Ukraina terpaksa kehilangan tempat tinggal mereka di negaranya sendiri. Jumlah tersebut merupakan jumlah populasi terbesar di dunia yang harus kehilangan tempat tinggal mereka sendiri akibat konflik yang melanda. Perang Ukraina telah memicu krisis pengungsi dan krisis kemanusiaan yang tumbuh paling cepat. Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa ancaman krisis global kini ada di depan mata. Saat ini, sekitar 320 juta penduduk dunia berada dalam kondisi kelaparan akut. Menurut data IMF dan Bank Dunia, perekonomian 66 negara diprediksi akan bangkrut dan ambruk dan pelambatan dan kontraksi pertumbuhan ekonomi global semakin diperburuk oleh tingginya kenaikan inflasi.

Berkat kesigapan Pemerintah dalam menyikapi ancaman krisis, dari hasil survey Bloomberg, Indonesia dinilai sebagai negara dengan resiko resesi yang kecil, hanya tiga persen, sangat jauh jika dibandingkan dengan rata-rata negara Amerika dan Eropa, yang mencapai 40 hingga 55 persen, ataupun negara Asia Pasifik pada rentang antara 20 hingga 25 persen. Namun demikian, kita tidak boleh lalai, kenaikan inflasi dapat menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik mencatat, bahwa per Juli 2022, laju inflasi Indonesia berada di level 4,94 persen, dan pada bulan Agustus diprediksi akan meningkat pada kisaran 5 hingga 6 persen. Bahkan pada bulan September mendatang, kita diprediksi akan menghadapi ancaman hiper-inflasi, kita akan diprediksi akan masuk pada kisaran 10 hingga 12 persen.

Laju kenaikan inflasi, disertai dengan lonjakan harga pangan dan energi, semakin membebani masyarakat, yang baru saja bangkit dari pandemi Covid-19. Lonjakan harga minyak dunia pada awal April 2022 diperkirakan mencapai 98 US Dolar per barel. Angka ini jauh melebihi asumsi APBN 2022 sebesar 63 US dolar per barel. Di sisi lain, beban subsidi untuk BBM, Pertalite, Solar, dan LPG, sudah mencapai 502 lebih triliun. Kenaikan harga minyak yang terlalu tinggi, tentunya akan menyulitkan kita dalam mengupayakan tambahan subsidi, untuk meredam tekanan inflasi. Tidak ada negara yang memberikan subsidi sebesar itu.

Kondisi fiskal dan moneter Indonesia juga perlu menjadi perhatian. guna menghadapi potensi krisis global. Di sektor fiskal, tantangan yang harus dihadapi adalah normalisasi defisit anggaran, menjaga proporsi utang luar negeri terhadap produk domestik bruto, dan keberlanjutan pembiayaan infrastruktur. Dari segi moneter, tantangan terbesar adalah mengendalikan laju inflasi, menjaga cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Pengembangan kemampuan sektoral, terutama konsolidasi demokrasi, ekonomi hijau, infrastruktur digital, dan pembangunan ibu kota negara, keberlanjutan komitmen lintas pemerintahan merupakan landasan utama bagi pembangunan nasional jangka panjang, dan sekaligus upaya me-mitigasi berbagai risiko yang dihadapi di masa depan.

Defisit anggaran yang harus kembali ke angka kurang dari 3 persen pada tahun 2023, menjadi tantangan utama, karena kondisi pemulihan yang tidak menentu. Selain itu, peningkatan utang yang signifikan menimbulkan beban pembayaran bunga tambahan. Saudara-saudara sekalian, sebagai strategi jangka pendek, penyusunan prioritas dan re-alokasi anggaran secara tepat diperlukan. Kebijakan *burden sharing* tidak hanya dengan moneter, tetapi juga dengan dunia usaha, dapat menjadi opsi dalam upaya pembiayaan ketidakpastian di masa yang akan datang. Sementara itu, strategi jangka panjang membutuhkan perencanaan pembayaran utang setidaknya untuk 30 tahun kedepan, dan pada saat ini yang bersamaan, memastikan kondisi fiskal dan moneter tetap terjaga.

Di sisi lain, pembayaran kupon dan jatuh tempo utang pemerintah, akan berdampak pada pengurangan cadangan devisa kita. Berdasarkan data bulan Juli 2022, kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri sebesar 21,6 miliar US dollar per bulan. Lebih lanjut, posisi cadangan devisa Indonesia pada bulan Juli ini, masih senilai lebih dari dua kali lipat dari standar kecukupan internasional, jadi masih Ok.

Sidang Majelis dan Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan, Indonesia sebagai negara bangsa yang berdaulat memiliki peran strategis di kancah global. Terlebih Indonesia kini memegang Presidensi G-20, yang pada puncaknya, 20 pemimpin dunia akan bertemu pada KTT G-20 di Bali, bulan November nanti. Oleh karenanya, suara Indonesia diharapkan bisa turut memberikan alternatif solusi di tengah dinamika global yang sedang bergejolak. Indonesia dengan politik bebas aktif, serta berpegang teguh pada prinsip Dasa Sila Bandung sebagai ruh politik luar negeri Indonesia perlu terus mengonsolidasi dukungan negara-negara di kawasan, untuk menyerukan solusi perdamaian permanen dalam mengatasi konflik dan ketegangan militer.

Selain itu, Indonesia juga perlu menawarkan agenda konsolidasi ekonomi, untuk mencapai kerjasama strategis, serta menjembatannya dengan komitmen pembangunan inklusif secara global melalui G-20. Tema "*Recover Together, Recover Stronger*" merupakan bukti komitmen Indonesia, untuk membawa dunia yang lebih inklusif dan segera bangkit bersama-sama di tengah Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Mari kita mendoakan, KTT G-20 berjalan lancar dan sukses. Kita tentunya berkeinginan, kepemimpinan Indonesia di G-20 tahun ini, kelak dikenang dunia sebagai upaya nyata dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai, tumbuh berkelanjutan, serta menghapus segala penderitaan rakyat di dunia.

Dengan semangat yang sama, MPR tengah merintis pembentukan Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia. Gagasan pembentukan forum ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan menghadirkan penguatan diplomasi parlemen dalam rangka menghadirkan tatanan dunia yang semakin harmonis dan berkeadaban.

Penyelesaian berbagai masalah dunia menuntut adanya partisipasi semua pihak, dengan melibatkan kerjasama lintas-negara, lintas-sektor, dan lintas-lembaga pemerintahan. Setiap elemen harus mengambil peran atas dasar solidaritas kemanusiaan yang menjunjung tinggi persatuan, persaudaraan, perasaan senasib-sepenanggungan, serta menjunjung tinggi keadilan, penegakan hukum, dan hak asasi manusia.

Sidang Majelis dan Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan, menuju Indonesia EMAS tahun 2045, bangsa Indonesia akan menghadapi banyak perubahan yang mengandung peluang dan tantangan. Munculnya berbagai kecenderungan baru berskala global dengan daya dorong besar, menuntut watak politik yang lebih antisipatif dengan haluan berjangka panjang. Berangkat dari kenyataan itu, perlu ada pemikiran untuk mengingatkan kita semua, serta menunjukkan peta jalan pembangunan yang lebih dapat diandalkan. Jalan pembangunan yang lebih menjamin ketahanan nasional, dengan kesanggupan untuk merealisasikan visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta, jalan pembangunan yang lebih menjamin kesinambungan pembangunan tanpa bergantung pada momen elektoral lima (lima) tahunan, termasuk di dalamnya pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tidak boleh terhenti karena adanya penggantian kepemimpinan nasional.

Saudara-saudara sekalian yang kami banggakan, pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang, guna mewujudkan IKN menjadi kota dunia yang berkelanjutan dengan konsep *smart, green, blue city*, serta *hub* bagi perekonomian nasional dan regional, dibutuhkan haluan negara serta konsistensi lintas pemerintahan. Tidak hanya itu, pembangunan IKN diharapkan menjadi katalis, untuk mendorong Indonesia melakukan lompatan teknologi. Pembentukan “haluan negara” yang dipatuhi oleh pemerintahan periode-periode berikutnya, menjadi aspek krusial untuk mengarahkan pembangunan khususnya untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045.

Hadirnya Pokok-Pokok Haluan Negara tidak akan mengurangi sistem presidensial yang telah kita sepakati bersama. Tidak akan menimbulkan kewajiban bagi Presiden untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Pokok-Pokok Haluan Negara kepada MPR. Adanya Pokok-Pokok Haluan Negara justru akan menjadi payung ideologis dan konstitusional bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045. Jika Pokok-Pokok Haluan Negara disepakati oleh seluruh komponen bangsa, maka calon Presiden dan calon Wakil Presiden, calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati/Walikota dan calon Wakil Bupati/Walikota, tidak perlu menetapkan visi dan misinya masing-masing, melainkan seluruhnya memiliki visi dan misi yang sama, yaitu visi dan misi sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menaikan derajat visi-misi Presiden, Bupati, Walikota, Gubernur, menjadi visi-misi negara.

Sidang Majelis dan Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan, Badan Pengkajian MPR dengan mendasarkan pada aspirasi masyarakat dan daerah, telah menyelesaikan kajian substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, dan telah disampaikan kepada Pimpinan MPR pada tanggal 7 Juli 2022, serta telah dilaporkan dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD, pada tanggal 25 Juli 2022 yang lalu.

Badan Pengkajian MPR merekomendasikan, untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara tanpa melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Memahami dengan seksama *original intent* Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diubah, menyatakan bahwa : “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.”

Penulisan frasa garis-garis besar daripada haluan negara yang menjadi satu rangkaian kalimat dengan frasa menetapkan Undang-Undang Dasar, mengandung makna, bahwa Pokok-Pokok Haluan Negara yang merupakan garis-garis besar daripada haluan negara, perlu diatur melalui peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada di bawah Undang-Undang Dasar, tetapi harus di atas undang-undang. Alasannya, Pokok-Pokok Haluan Negara tidak boleh lebih filosofis daripada Undang-Undang Dasar, sekaligus tidak boleh bersifat teknis atau teknokratis seperti Undang-Undang.

Dengan demikian, memang idealnya, Pokok-Pokok Haluan Negara perlu diatur melalui Ketetapan MPR, dengan melakukan perubahan terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, untuk saat ini, seperti kita pahami bersama, gagasan tersebut sangat sulit untuk kita direalisasikan. Oleh sebab itu, mengingat urgensinya berkaitan dengan momentum lima tahunan, gagasan menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara yang diatur melalui Ketetapan MPR, cara menghadirkannya akan diupayakan melalui konvensi ketatanegaraan.

Dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD, secara aklamasi menerima hasil kajian substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara. Untuk menindaklanjuti kajian substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara tersebut, pada awal bulan September yang akan datang, MPR akan menyelenggarakan Sidang Paripurna dengan agenda tunggal pembentukan Panitia *Ad Hoc* MPR, dengan terlebih dulu memberikan kesempatan kepada Fraksi dan Kelompok DPD untuk menyampaikan pemandangan umumnya. Dengan kesepakatan Rapat Gabungan tersebut, kita memiliki harapan untuk menuntaskan Rekomendasi MPR tentang Pokok-Pokok Haluan Negara, yang telah melewati dua periode keanggotaan MPR. Dan, yang paling utama Bapak Presiden, dengan adanya Pokok-Pokok Haluan Negara, maka Indonesia akan memiliki peta jalan pembangunan, yang memberi arah pencapaian tujuan negara dengan mempertemukan nilai-nilai Pancasila dengan aturan dasar yang diatur konstitusi.

Sidang Majelis dan Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan, vaksinasi ideologi berupa sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika atau lebih dikenal dengan istilah Empat

Pilar, yang dimandatkan kepada MPR adalah tugas mulia yang harus dilakukan sepanjang hayat. Untuk itu Pimpinan MPR juga akan dibantu oleh Forum Aspirasi Konstitusi untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Pancasila merupakan dasar persatuan bangsa dan Indonesia adalah bangsa paling majemuk di dunia, terdiri atas ratusan komunitas etnik, budaya dan agama. Di dalam rumah besar Indonesia, kita hanya mengenal kata satu. Satu Tanah Air Indonesia, Satu Bangsa Indonesia, dan Satu Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia.

Mimpi kita tentu tidak hanya tertuju dan berhenti pada tahun 2045. Saat Indonesia menjadi negara dengan posisi ekonomi keempat terbesar di dunia, kita harus berani bermimpi yang lebih besar lagi, menjadikan Indonesia sebagai pelopor dalam merangkul dan mempersatukan setiap perbedaan yang ada. Menjadi contoh bagi dunia, yang benar-benar rukun dalam kemajemukan, peduli dengan kesejahteraan dan kemajuan rakyatnya. Kita harus berupaya agar Pancasila menjadi sebuah ideologi yang mempengaruhi evolusi dunia.

Saudara-saudara sekalian, Sidang Majelis dan Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan, terkait dengan perkembangan pelaksanaan wewenang dan tugas konstitusional MPR tahun 2022. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara yang akan disampaikan oleh Presiden, sekaligus Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, pada sidang akan kami serahkan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD. Ketua DPR, Ibu Dr. (H.C.) Puan Maharani akan melanjutkan persidangan sampai ditutupnya Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD.

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, izinkan kami mengakhiri pengantar Sidang Tahunan MPR ini dengan dua bait pantun, untuk menggugah kesadaran kita dalam berbangsa dan bernegara:

Kupu-kupu terbang bersama kumbang, hinggap di dahan pohonnya palsu.
Para Capres/cawapres tak perlu bimbang, ingat pesan Presiden : *ojo kesusu*.
Burung merpati terbang di atas sawah, purnama datang dari negeri sebelah.
Koalisi masih bisa berubah, pemilu jangan sampai membuat kita terbelah.

Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Selanjutnya saya persilakan Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk melanjutkan dan memimpin sidangnya. Sekian dan terima kasih.

Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA DPR RI (Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI)

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua MPR RI, pada sidang telah kami terima dan sidang kami lanjutkan.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

- Yang Terhormat, Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Iriana Joko Widodo;
- Yang Terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Wury Estu Handayani Ma'ruf Amin;
- Yang Terhormat, Presiden ke-5 Republik Indonesia, Ibu Dr. (H.C.) Megawati Soekarnoputri;
- Yang Terhormat, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Try Sutrisno;
- Yang Terhormat, Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Bapak Hamzah Haz;
- Yang Terhormat, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Jusuf Kalla;
- Yang Terhormat, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Boediono;
- Yang Terhormat, Wakil Ketua dan Anggota DPR RI;
- Yang Terhormat, Ketua, Para Wakil Ketua, dan Anggota DPD RI;
- Yang Terhormat, Ketua dan Para wakil Ketua Lembaga Negara;
- Yang Terhormat, Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
- Yang Terhormat, Panglima TNI;
- Yang Terhormat, Kapolri;
- Yang Mulia para Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Sahabat;
- Yang Terhormat, Para Ketua Umum Partai Politik:
 1. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Prof. Dr. (H.C.) Megawati Soekarnoputri;
 2. Ketua Umum Partai Golkar, Dr. (H.C.) Ir. Airlangga Hartanto, MBA., MMT.;
 3. Ketua Umum Partai Gerindra Letjen TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto;
 4. Ketua Umum Partai Nasdem Dr. (H.C.) Drs. Surya Dharma Paloh;
 5. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar;
 6. Ketua Umum Partai Demokrat Mayor Inf. (Purn.) H. Agus Harimukti Yudhoyono;
 7. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, H. Ahmad Syaikhu;
 8. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Dr. (H.C.) H. Zulkifli Hasan;
 9. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Dr. (H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa;
- Yang Terhormat, Rekan-rekan Pers, Para undangan dan hadirin yang berbahagia.
- Yang kami muliakan, Seluruh Rakyat Indonesia.

Kita patut bersyukur bahwa Sidang Bersama Tahun ini pada akhirnya kembali dapat diakhiri secara fisik oleh seluruh Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, serta undangan lainnya. Perlu kami sampaikan pula bahwa para teladan pada sidang hari ini mengikuti secara *streaming* mengingat jumlah para teladan yang cukup banyak sehingga tidak mungkin hadir di Ruang Sidang Paripurna karena kami masih tetap menerapkan protokol kesehatan.

Saudara Presiden dan Wakil Presiden, hadirin peserta sidang yang terhormat dan seluruh rakyat Indonesia yang saya muliakan, Puji Syukur

Kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI sebagai negara berdasar pada Keuhanan yang Maha Esa, kita tentu saja harus selalu bersyukur karena bangsa dan negara kita tetap dapat bersatu dalam menghadapi situasi yang sulit untuk menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah negara tetap dapat menjalankan tugasnya untuk melindungi segenap rakyat dan tumpah darah serta mensejahterakan rakyat.

Sejak kasus pertama kali Covid-19 di Indonesia diumumkan, yaitu pada tanggal 02 Maret 2020 hingga saat ini kita telah berada selama 29 (dua puluh Sembilan) bulan dalam situasi pandemi Covid-19, dan kini kita mulai memasuki masa transisi dari pandemi menuju endemi yang tetap perlu terus diwaspadai. Selama masa pandemi Covid-19 melanda negeri ini kita melihat ideologi Pancasila telah bekerja dengan konkret memandu bangsa Indonesia menciptakan gerakan gotong royong yang masif secara bergantian dengan kesadarannya sendiri, warga masyarakat kita saling tolong-menolong dan gerakan itu terjadi hampir di seluruh penjuru negeri. Gotong royong dalam skala besar ini, saya yakini menjadi salah 1 kunci utama pemulihan kekuatan, pemulihan sosial dan ekonomi pasca pandemi bangsa Indonesia.

Pada tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 mulai melanda dan mengancam kehidupan rakyat, pemerintah telah diberikan ruang kewenangan yang cukup untuk mengambil tindakan cepat dan antisipatif demi keselamatan rakyat dan memastikan jalannya pemerintahan. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Penanganan Pandemi Covid-19 diproses secara cepat dan cermat di DPR RI, sehingga tidak terjadi kekosongan payung hukum untuk menangani pandemi yang melanda sebagian besar negara di dunia. *Alhamdulillah*, berkat kerja bersama kita semua, gotong royong, pandemi Covid-19 dapat ditangani dengan baik. Bahkan, dalam rilis data John Hopkins University terkait penanganan Covid-19 pada tahun 2021, Indonesia dinilai sebagai salah satu negara terbaik di dunia dalam menangani pandemi Covid-19. Inilah hasil kerja bersama kita gotong royong melawan pandemi Covid-19.

Dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita berikan apresiasi secara khusus kepada seluruh anak bangsa yang telah berada di garis terdepan untuk membantu rakyat dalam menghadapi ancaman pandemi Covid-19. Terima kasih kepada tenaga kesehatan dan medis, terima kasih kepada TNI, terima kasih kepada POLRI, terima kasih Satgas Covid-19 di pusat dan daerah, serta terima kasih kepada para relawan kemanusiaan. Kemampuan kita dalam menghadapi pandemi Covid-19 semakin membuktikan bahwa kekuatan gotong royong, kerja bersama, saling bantu binantu, *holupis kuntul baris* yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.

Pancasila merupakan kekuatan nasional kita yang paling utama dalam menjaga kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita. Meninggalkan Pancasila sama halnya mencabut jatidiri bangsa dari akar terdalamnya dan mengkhianati amanat para pendiri bangsa. Mengganti Pancasila akan berdampak pada hilangnya karakter sebagai bangsa yang ramah, toleran, dan bergotong royong. Saudara Presiden dan saudara wakil Presiden, hadirin sidang yang terhormat dan seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Esok, tanggal 17 Agustus tahun 2022 adalah

77 tahun hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, semangat untuk merdeka yang digelorakan 77 tahun yang lalu adalah semangat untuk dapat menyusun bangsa dan nasib tanah air oleh bangsa Indonesia sendiri, sehingga dapat mewujudkan kehidupan negara Indonesia yang merdeka, Bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Telah 77 tahun lamanya kita telah menyusun dan membangun kemajuan Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan pasang surut. Gelombang pembangunan disertai dengan gelombang globalisasi dan kemajuan teknologi telah menggerakkan berbagai reformasi dan transformasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tugas membangun bangsa dan negara kita ke depan menghadapi tantangan dan kendala yang tidak ringan, kita masih menghadapi ketidakpastian situasi pandemik Covid-19, konflik geopolitik, pemulihan ekonomi global di tengah-tengah kerentanan pangan, energi, pengangguran, tekanan moneter global, degradasi lingkungan hidup, serta ancaman bencana alam dan sebagainya.

Saat ini kita juga berada di dalam era globalisasi, era kemajuan teknologi dan industri yang semakin cepat dan dinamis yang telah menempatkan masyarakat kita terbuka dan terhubung secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik, sehingga berbagai ideologi trans-nasional, cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup dengan mudah masuk mempengaruhi ke dalam kehidupan rakyat Indonesia. Hal tersebut belum tentu sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, bahkan dapat menggerus nilai-nilai luhur bangsa dan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia, seperti nilai-nilai agama, budaya sopan-santun, etika, dan toleransi, serta sikap saling menghormati di antara sesama bangsa Indonesia.

Apabila kebudayaan yang berkembang di wilayah Indonesia dibiarkan secara alamiah, maka tidak mustahil ideologi dan budaya trans-nasional akan menjadi tuan di negeri ini. Tidak akan ada lagi jati diri ke-Indonesiaan, jatidiri kita yang bisa dibanggakan. Tentu saja kita tidak anti-budaya asing, kita tidak dapat mengisolasi diri dari pengaruh budaya asing. Akan tetapi, dengan kepribadian jiwa bangsa yang kuat, maka budaya asing dapat disaring dan dilarutkan dalam kebudayaan nasional.

Kita, sebagai bangsa dan negara, semakin dituntut untuk dapat memiliki kemampuan dan kekuatan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, agar dapat mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian berlandaskan Pancasila. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua, seluruh pemangku kepentingan, seluruh anak bangsa, untuk membangun kekuatan nasional kita, yang dimulai dari kesadaran, kemauan dan komitmen untuk ikut ambil bagian dalam kerja bersama, gotong royong, memajukan Indonesia di segala bidang. Komitmen dan Kebersamaan yang bersumber dari cinta pada tanah air dan cinta pada bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ber-Pancasila dan Ber-Bhineka Tunggal Ika.

Banyak cara dalam berpartisipasi, bergotong royong, kerja bersama menyusun dan membangun Indonesia, ada dengan cara menjadi aparatur sipil negara, menjadi swasta, ada juga yang bergerak dalam dunia pendidikan, mengabdikan di bidang sosial, bidang religius, bidang kesehatan, politik, bergerak di bidang jurnalistik, pers, olahraga, kesenian, pengamat, dan lain sebagainya. Seluruh partisipasi tersebut dapat diartikulasikan dalam bentuk gagasan, kerja, prestasi, gerakan, kritik, dan lain sebagainya.

Semua bentuk partisipasi menyusun dan membangun Indonesia tersebut apabila ditujukan untuk memajukan Indonesia maka arah dari kerja bersama tersebut akan memberikan energi yang positif bagi produktifitas memajukan Indonesia, memperkuat kebersamaan rakyat, mempersatukan rakyat, memperkuat semangat kebangsaan Indonesia, serta membudayakan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai bintang penuntun arah perjalanan bangsa, akan benar-benar menjadi energi yang mewujudkan jiwa pengabdian untuk bangsa dan negara. Dengan jiwa pengabdian membangun Indonesia, maka Politik Pembangunan Indonesia dalam mengisi kemerdekaan dapat fokus pada upaya-upaya untuk kesejahteraan rakyat, kemajuan pembangunan diseluruh wilayah tanah air, dan pembangunan kebudayaan nasional.

Politik pembangunan membutuhkan tahapan pelaksanaan, prioritas, pengelolaan sumber daya, dan perencanaan pembangunan nasional. Sasaran Pembangunan, tidak hanya pembangunan fisik akan tetapi juga menjangkau pembangunan karakter bangsa. Politik Pembangunan merupakan upaya melalui cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup agar dapat mencapai kemajuan dan mewujudkan tujuan nasional. Bagaimana kita dapat mewujudkan pembangunan nasional yang terencana, terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan?

Pasca Amandemen UUD 1945, perencanaan pembangunan jangka panjang, sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap, dirumuskan dalam undang-undang, yaitu Undang Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Keberadaan undang-undang ini dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh, dirasakan belum optimal, bahkan setiap Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota memiliki visi misi pembangunannya masing-masing. Visi dan misi berbangsa dan bernegara digantikan dengan visi dan misi perseorangan setiap Presiden dan Kepala Daerah. Realitas tersebut yang mengakibatkan pembangunan nasional bangsa Indonesia, sulit berkesinambungan, berorientasi pada jangka pendek, kadar kepentingan nasional yang berbeda-beda, sehingga terkesan Pembangunan Nasional hanya dari proyek ke proyek.

Politik pembangunan kedepan hendaknya dapat mengintegrasikan seluruh wilayah yang ada di Indonesia, seluruh pemerintahan pusat dan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, kemajuan bangsa, dan kebudayaan nasional. Dalam mempercepat capaian kemajuan Indonesia, selain pemulihan sosial dan ekonomi nasional, maka agenda strategis kedepan perlu memperkuat dan mempertajam upaya-upaya yang diarahkan pada: pembangunan kualitas dan karakter nasional manusia Indonesia; pembangunan kedaulatan pangan nasional; penguatan industri nasional; pemerataan pembangunan infrastruktur; serta reformasi birokrasi yang nyata.

Kita perlu memberikan perhatian yang besar pada generasi muda Indonesia. Kedepan merekalah yang akan mewarisi Indonesia, saat ini generasi muda Indonesia telah banyak menunjukkan prestasi yang membanggakan baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, digital, seni budaya, olahraga, *startup* dan lain sebagainya. Kedepan, berbagai upaya agar diarahkan untuk memperkuat kemudahan akses dan kesempatan untuk

memperoleh pendidikan disetiap jenjang; memperkuat vokasional; memperkuat ruang kewirausahaan.

Kita perlu memperkuat upaya yang fokus pada peningkatan produktivitas pangan, industri pangan dan kesejahteraan petani. Kedepan jangan terjadi lagi permasalahan seperti kelangkaan minyak goreng di negeri sendiri, yang merupakan negara penghasil CPO terbesar di dunia. Kita tidak ingin hanya menjadi sasaran pasar dari produk luar, kita ingin dapat berdikari di bidang ekonomi melalui industri nasional. Kita juga tidak ingin bangsa Indonesia hanya menjadi kuli di negerinya sendiri. Kita harus bangga menggunakan produk anak bangsa Indonesia. Pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan perhatian kita semua. Kemajuan pembangunan di daerah adalah Kemajuan Indonesia.

Jumlah Aparatur Sipil Negara kita saat ini, lebih dari 3,9 juta. Reformasi Birokrasi yang dijalankan oleh Aparatur Sipil Negara, merupakan sebuah modal kekuatan dalam mempercepat kemajuan Indonesia; Aparatur Sipil Negara harus meninggalkan sikap “membenarkan yang biasa” dan mulai dengan semangat baru yaitu “membiasakan yang benar”. Agenda strategis nasional kedepan lainnya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. DPR RI telah memberikan dukungan untuk Pembangunan Ibu Kota Negara. Ibu Kota Negara, Nusantara, diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, menjadi simbol identitas nasional, dan menjadi kota dunia ideal yang dapat menjadi acuan dunia.

Ibu Kota Negara telah menjadi amanat undang-undang yang akan dilaksanakan sesuai dengan peta jalan serta pentahapan pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara. Keberhasilan Pembangunan Ibu Kota Negara, selain membutuhkan perencanaan dan manajemen sumber daya yang baik, juga sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anak bangsa untuk dapat selaras dalam memaknai Ibu Kota Negara sebagai agenda kita bersama dalam membangun ekonomi Indonesia masa depan dan momentum dalam melaksanakan paradigma pemerataan pembangunan nasional.

Arah dan prioritas agenda-agenda pembangunan nasional kedepan membutuhkan landasan hukum yang memadai untuk dapat dilaksanakan oleh setiap pemerintahan, sehingga pembangunan fisik dan pembangunan karakter bangsa dapat berkesinambungan dalam mencapai tujuan nasional. Kita perlu rembuk bersama, untuk menentukan kemana arah pembangunan bangsa dan negara Indonesia kedepan yang dapat menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan.

Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Hadirin Sidang yang terhormat, dan seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan demokrasi di Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu suatu pelaksanaan permusyawaratan dan perwakilan rakyat yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan yang menjangkau untuk seluruh rakyat Indonesia, yang memiliki keberagaman suku, bahasa, agama, keyakinan, budaya dan karakteristik wilayah. Dengan demokrasi yang berlandaskan Pancasila, maka setiap kebijakan negara diarahkan untuk mempersatukan seluruh komponen bangsa Indonesia sehingga dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan seluruh rakyat, mencerdaskan kehidupan seluruh anak bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Demokrasi adalah alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Pemilu merupakan upaya untuk menyempurnakan demokrasi. Oleh karena itu, dalam membangun peradaban demokrasi di Indonesia agar semakin maju, maka diperlukan pelaksanaan Pemilu yang berkualitas, dibutuhkan partai politik peserta Pemilu yang semakin maju dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat dan senantiasa memegang teguh komitmennya untuk menjaga dan mengawal Pancasila serta memperkuat persatuan bangsa.

Pelaksanaan Pemilu Legislatif, Presiden dan Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024. Tahapan Pemilu sudah dan sedang dijalankan oleh KPU. Menjadi komitmen kita bersama, untuk menjadikan Pemilu 2024 sebagai Pemilu yang demokratis, jujur, adil dan bermartabat. Kita semua dapat merasakan, bahwa tahun politik sepertinya datang lebih awal. Perbincangan tentang suksesi kepemimpinan nasional menjadi topik di media sosial hingga warung-warung kopi di penjuru negeri. Fakta ini tentu menggembirakan, sebab masyarakat kita sudah dewasa dalam menghadapi perbedaan pilihan politik. Sejak pemilu demokratis kembali digelar pada tahun 1999, masyarakat sudah mengajarkan kepada kita semua bagaimana menyikapi perbedaan dalam politik. Kita tentu paham kapan waktu bertanding, dan kapan waktu bersanding.

Marilah kita bangun komitmen bersama untuk melaksanakan pesta demokrasi dengan aman, damai, bersuka ria dan tanpa memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa. Di dalam negara demokratis, terdapat ruang partisipasi rakyat. Negara memastikan ruang partisipasi rakyat tersebut dapat terselenggara dengan baik dan tidak tak terbatas. Demokrasi menjamin partisipasi warga bangsa dalam mengartikulasikan hak politik, hak sosial, hak budaya dan hak ekonomi. Bahkan juga memberikan ruang artikulasi kaum perempuan dalam segala bidang.

Menyertakan perempuan dalam setiap jabatan bukan sebagai kebijakan afirmatif, akan tetapi merupakan kesadaran atas penghargaan harkat dan martabat manusia. Perempuan Indonesia telah banyak aktif dan mengambil peran yang strategis di segala bidang: ekonomi, sosial, politik, lingkungan hidup, olahraga, ilmu pengetahuan, riset, dan lain sebagainya. Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayapnya sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu dari pada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali. Inilah semangat yang juga harus kita tanamkan bersama dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia, dimana perempuan dan laki-laki dalam harkat, martabat, kemajuan dan kesejahteraan yang sama.

Demokrasi bukanlah kebebasan tak terbatas. Batas dari hak setiap warga bangsa di dalam negara demokratis adalah menjamin hak warga bangsa yang lain sama pentingnya; hak warga bangsa dibatasi oleh hak warga bangsa yang lainnya. Oleh karena itulah peran negara diperlukan untuk menjamin hak berdemokrasi yang sama bagi semua warga bangsa; hak mendapatkan rasa aman yang sama bagi semua warga bangsa; hak untuk

hidup tentram yang sama bagi semua warga bangsa. Inilah tugas kita bersama, untuk membangun peradaban demokrasi yang memuliakan nilai kemanusiaan dan menjaga martabat bangsa.

Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin sidang yang terhormat, dan seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan Dengan tema peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-77, yaitu "Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat", maka menjadi momentum bagi kita dalam mengambil tekad dan upaya untuk segera kembali melanjutkan pembangunan nasional untuk kemajuan Indonesia.

MPR RI, DPR RI dan DPD RI, sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, akan terus bersinergi dengan Pemerintah dan masyarakat untuk percepatan pemulihan kondisi disemua sektor kehidupan. Sebagai anak bangsa, kita semua siap "*Cancut Taliwondo*," menyingsingkan lengan baju, agar kita segera pulih dan bangkit untuk menjemput impian kolektif kita sebagai bangsa yakni Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Selama 77 tahun, kita menyusun dan membangun Indonesia, telah banyak berbagai perkembangan dan kemajuan, baik dari sisi tata negara, sistem berdemokrasi, sistem pemerintahan, kehidupan dan penghidupan rakyat; telah banyak capaian dan prestasi anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Masih terdapat berbagai kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam kita menyusun dan membangun negara Indonesia; hal tersebut membutuhkan kerja bersama kita untuk terus menyempurnakannya; ketidaksempurnaan dalam kita membangun negara, bukan menjadi alasan untuk memusuhi negara, mencaci maki negara. Janganlah kita selalu mengutuk kegelapan tetapi marilah kita mulai hidupkan lilin penerang, yang dapat memberikan cahaya, sekecil apapun itu, sehingga dapat memberikan ruang gerak dan keleluasaan dalam bekerja dan membangun bangsa.

Presiden pertama kita, Ir. Soekarno, tegas menyatakan kemerdekaan nasional adalah jembatan emas. jembatan emas menuju Indonesia adil makmur, sejahtera. Bangsa dan negara kita, memiliki gagasan untuk merdeka, memiliki jiwa rakyat untuk bersatu, memiliki wilayah zamrud khatulistiwa yang kaya raya, memiliki kekayaan budaya bangsa. Marilah kita bersama-sama, kerja bersama, bergotong royong, mengisi ruang-ruang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk mensejahterakan rakyat, memajukan kehidupan bangsa, dan membangun kebudayaan nasional, semangat bersama dan bersatu untuk memajukan Indonesia Raya yang sejati-sejatinya. Sekali merdeka tetap merdeka! Selama hayat masih dikandung badan kita tetap setia, kita tetap sedia, mempertahankan Indonesia, membela negara Indonesia, memajukan Indonesia Raya, merdeka! Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin peserta sidang yang terhormat dan seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan, kini tiba saatnya, kami mempersilakan Saudara Presiden untuk menyampaikan pidato tentang penyampaian kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia di hadapan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI hari ini. Kepada Saudara Presiden, kami persilakan.

PRESIDEN RI (Ir. H. JOKO WIDODO)

Bismillaahirrahmaanirrahiim, Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Selamat pagi, Salam sejahtera bagi kita semuanya, *Shallom Om Swastyastu, Namu Buddhaya*, Salam Kebajikan.

- Yang saya hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. (H.C.) KH Ma'ruf Amin beserta Ibu Hj. Wury Estu Ma'ruf Amin;
- Yang saya hormati, Ibu Hajah Prof. Dr. (H.C.) Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia kelima;
- Yang saya hormati Ibu Hajah. Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, istri Presiden Republik Indonesia keempat
- Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno Wakil Presiden Republik Indonesia keenam
- Yang saya hormati Bapak Hamzah Haz Wakil Presiden Republik Indonesia kesembilan
- Yang saya hormati Bapak Muhammad Jusuf Kalla Presiden Republik Indonesia kesepuluh dan kedua belas
- Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Boediono Wakil Presiden Republik Indonesia kesebelas
- Yang saya hormati ketua, para wakil ketua dan para anggota MPR Republik Indonesia
- Yang saya hormati ketua, para wakil ketua dan para anggota DPR Republik Indonesia
- Yang saya hormati ketua, para wakil ketua dan para anggota DPD Republik Indonesia
- Yang saya hormati ketua, para wakil ketua dan para Lembaga-lembaga negara
- Yang saya hormati yang mulia para duta besar negara-negara sahabat dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional yang hadir.
- Yang saya hormati anggota para Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN
- Yang saya hormati, para Ketua Umum Partai- Partai Politik yang hadir

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air Para hadirin yang berbahagia. Tantangan yang kita hadapi sangat berat sangat sulit tidak mudah. Semua negara, di seluruh dunia sedang menghadapi ujian yang sama. Krisis kesehatan pandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih. Perekonomian dunia juga belum sepenuhnya bangkit. Tiba-tiba meletus perang di Ukraina, sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi. Kita tahu 107 (seratus tujuh) negara terdampak krisis, sebagian di antaranya diperkirakan jatuh bangkrut. Diperkirakan 553.000.000 (lima ratus lima puluh tiga juta) jiwa terancam kemiskinan ekstrem dan 345.000.000 (tiga ratus empat puluh lima juta) jiwa terancam kekurangan pangan akut dan kelaparan. Ujian ini tidak mudah bagi dunia dan juga tidak mudah bagi Indonesia. Semua ini harus kita hadapi dengan kehati-hatian dan dengan kewaspadaan. Namun, di tengah tantangan yang berat, kita patut bersyukur, Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini. Negara kita Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 termasuk 5 (lima) besar.

Negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, yaitu 432.000.000 (empat ratus tiga puluh dua juta) dosis vaksin telah disuntikkan. Inflasi juga berhasil dikendalikan di kisaran 4,9%. Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7%. Dan jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9%. Bahkan, sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus Rp106 triliun (seratus enam triliun rupiah). Oleh karena itu, Pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi LPG, dan subsidi listrik sebesar Rp502 triliun (lima ratus dua triliun) di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi.

Selain itu, ekonomi berhasil tumbuh positif di 5,44% pada kuartal II tahun 2022 ini. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut, dan di semester sa satu tahun 2022 ini surplusnya sekitar Rp364 triliun (tiga ratus enam puluh empat triliun rupiah). Capaian tersebut patut kita syukuri. Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah ekonomi dunia yang sedang bergolak. Di satu sisi, kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati-hati. Namun di sisi lain, agenda-agenda besar bangsa harus kita lanjutkan untuk meraih Indonesia Maju.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, bangsa Indonesia telah menunjukkan diri sebagai bangsa yang tangguh. Masyarakat dusun, masyarakat kampung saling melindungi dan saling berbagi. Ulama, tokoh agama, dan tokoh adat, aktif mendampingi masyarakat. Organisasi sosial keagamaan bergerak cepat membantu masyarakat. Tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan jajaran birokrasi saling bersinergi bersama-sama bergotong royong bersama-sama dan lembaga-lembaga negara juga mendukung Pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ini. Kalau kita mampu mengelola pandemi dengan baik, berarti artinya kita juga *insyaAllah* pasti mampu mengelola agenda-agenda besar lainnya dengan baik pula. Inilah kekuatan pertama kita untuk membangun Indonesia. Kekuatan kedua Indonesia adalah sumber daya alam yang melimpah. Wilayah yang luas dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia pasti menjadi kekuatan besar Indonesia, jika kita kelola secara bijak dan berkelanjutan. Syaratnya satu, harus dihilirkan dan diindustrikan di dalam negeri, agar nilai tambahnya bisa maksimal untuk kepentingan nasional. Hal ini akan membuka lapangan kerja, meningkatkan ekspor, menghasilkan devisa, meningkatkan pendapatan negara, serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kekuatan ketiga kita adalah bonus demografi. Jumlah penduduk yang sangat besar, dan didominasi oleh anak-anak muda usia produktif, serta daya beli masyarakat yang terus meningkat, akan menjadi motor penggerak perekonomian nasional dalam menghadapi kompetisi global.

Kekuatan keempat adalah kepercayaan internasional yang meningkat tajam. Indonesia diterima oleh Rusia dan juga diterima Ukraina sebagai jembatan perdamaian. Diterima negara-negara besar, walau geopolitik sedang panas dan juga dipercaya PBB sebagai Champions dari Global Crisis Response Group untuk penanganan krisis global baik krisis pangan Krisis energi maupun krisis keuangan dan tahun 2022 ini, kita menjadi Presiden G20, organisasi 20 negara ekonomi terbesar di dunia dan tahun depan kita juga menjadi Ketua negara-negara ASEAN. Artinya, kita berada di puncak kepemimpinan global dan memperoleh kesempatan besar untuk membangun

kerja sama – kerja sama internasional. Kepercayaan besar dari masyarakat internasional ini juga bisa dirasakan di dalam negeri. Reformasi struktural untuk daya saing dan iklim berusaha terus kita lakukan. Ekosistem investasi dan pertumbuhan UMKM terus kita perbaiki. Hilirisasi dan manufaktur di dalam negeri juga terus tumbuh pesat. Pertumbuhan investasi juga meningkat tajam, di mana saat ini 52%-nya sudah berada di luar Pulau Jawa. Artinya, ekonomi kita bukan hanya tumbuh pesat, tetapi juga tumbuh merata, menuju pembangunan yang Indonesia Sentris.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Dengan kekuatan dan peluang besar tersebut, kita mempunyai kesempatan besar untuk membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus terus dilakukan. Hilirisasi nikel, misalnya, telah meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat. Saya ingat di tahun 2014, hanya sekitar Rp16 triliun (enam belas triliun rupiah), tapi di tahun 2021 kemarin meningkat menjadi Rp306 triliun (tiga ratus enam triliun rupiah) karena semua sudah dalam bentuk barang setengah jadi dan barang jadi dan di akhir tahun 2022 ini, kita harapkan sudah bisa mencapai Rp440 triliun (empat ratus empat puluh triliun rupiah) itu hanya dari nikel sekali lagi itu hanya dari nikel.

Selain penerimaan pajak, devisa negara juga naik, sehingga kurs rupiah lebih stabil. Sekarang ini, Indonesia telah menjadi produsen kunci dalam rantai pasok baterai litium global. Produsen mobil listrik dari Asia, dari Eropa, dan dari Amerika ikut berinvestasi di negara kita. Setelah nikel, Pemerintah juga akan terus mendorong hilirisasi bauksit, hilirisasi tembaga, dan hilirisasi timah. Kita harus berani kita harus membangun ekosistem industri di dalam negeri yang terintegrasi, yang akan mendukung pengembangan ekosistem ekonomi hijau dunia. Yang kedua, selain hilirisasi, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau harus terus kita tingkatkan. Persemaian dan rehabilitasi hutan tropis dan hutan mangrove, serta rehabilitasi habitat laut, akan terus dilakukan, dan akan menjadi potensi besar penyerap karbon. Energi bersih dari panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut, dan energi bio, akan menarik industrialisasi penghasil produk-produk rendah emisi. Kawasan industri hijau di Kalimantan Utara akan menjadi Green Industrial Park terbesar di dunia. Saya optimistis, kita akan menjadi penghasil produk hijau yang kompetitif di perdagangan internasional. Upaya tersebut bisa langsung disinergikan dengan program peningkatan produksi pangan dan energi bio.

Pemanfaatan kekayaan hayati laut secara bijak, akan menjadi kekuatan besar untuk produk pangan, farmasi, dan energi. Demikian pula dengan perkebunan kita, antara lain kelapa sawit yang telah terbukti menjadi pemasok terbesar CPO dunia. Untuk konsumsi beras, kita sudah tidak lagi impor dalam tiga tahun terakhir untuk beras konsumsi. Pembangunan bendungan dan irigasi telah mendukung peningkatan produktivitas nasional kita. *Alhamdulillah*, kita baru saja memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute yang disaksikan oleh FAO, karena kita dinilai mampu mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras sejak tahun 2019.

Yang ketiga, perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat. Pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak

politik perempuan dan kelompok marjinal, harus terus kita jamin. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu. Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat hukum dan lembaga peradilan. Dan juga dengan pemberantasan korupsi juga terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai. Penyelamatan aset negara yang tertunda, seperti kasus BLBI, terus dikejar, dan sudah menunjukkan hasil. Skor Indeks Persepsi

Korupsi dari Transparansi Internasional, juga naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Indeks Perilaku Anti Korupsi dari BPS juga meningkat, dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022. Penyelesaian peng pelanggaran HAM berat masa lalu, juga terus menjadi perhatian serius Pemerintah. RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan. Tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan. Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu telah saya tanda tangani.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Saya tekankan, reforma agraria, perhutanan sosial, dan sertifikasi tanah harus terus dilanjutkan. Berbagai macam bantuan sosial akan dilanjutkan dengan sinergi dan data yang lebih baik. Program pelatihan dan bantuan untuk para pekerja akan terus ditingkatkan. Program-program ini menjangkau nelayan, petani, buruh, pekerja informal, dan penyandang disabel. Tentang disabel, kita juga baru saja menjadi tuan rumah ASEAN Para Games di Solo, dan *alhamdulillah* kita menjadi Juara Umum.

Yang keempat, UMKM harus terus didukung agar bisa segera naik kelas. Digitalisasi ekonomi yang telah melahirkan dua decacorn dan sembilan unicorn terus kita dorong untuk membantu pemberdayaan Usaha Mikro dan Menengah Kebawah (UMKM). 19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital dan ditargetkan sebesar 30 juta UMKM akan masuk ekosistem digital pada tahun 2024. Berbagai bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan. Penayangan produk UMKM di E-katalog pemerintah diharapkan akan menyerap produk UMKM. Di saat yang sama, kewajiban APBN, APBD, dan BUMN-BUMN untuk membeli produk dalam negeri juga akan terus didisiplinkan.

Kelima, pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dijaga keberlanjutannya. IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan. Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya, 80% investasi swasta diundang untuk berpartisipasi.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Semua agenda tersebut harus ditopang oleh manusia Indonesia yang unggul. Untuk itu, di bidang kesehatan, stunting harus cepat dipangkas. Layanan promotif dan preventif serta layanan pengobatan harus semakin kuat dan merata. Akses anak usia didik terhadap layanan pendidikan yang berkualitas harus terus diprioritaskan. Para siswa dan mahasiswa harus dikenalkan pada dunia kerja sejak dini. Minat anak di bidang sains, teknologi, seni, dan olahraga harus didukung dan diapresiasi. Oleh karenanya, budi pekerti yang luhur, ideologi

Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan patriotism merupakan pilar utama. Seni dan tradisi lokal dengan semangat kebangsaan harus terus digairahkan. Karya sastra dan film karya seniman muda harus terus didukung. Dana Abadi Kebudayaan akan terus kita tingkatkan sesuai kemampuan fiskal pemerintah.

Adapun tahapan Pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU harus kita dukung sepenuhnya. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Dan terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan, yang telah berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan kita serta merawat persatuan dan kesatuan nasional. Saya juga mengharapkan dukungan dari semua Lembaga-lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi di negeri tercinta ini, untuk memperkokoh ideologi bangsa. Saya menghargai upaya MPR dalam mendorong pengamalan Pancasila, mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, serta menggagas kerja sama internasional dalam mengatasi permasalahan global. Dukungan DPR dalam menghadapi krisis kesehatan dan perekonomian telah mampu membantu Pemerintah. DPR telah mendukung beberapa transformasi besar, antara lain Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

DPD, sesuai dengan kewenangannya, telah ikut berperan dalam penyusunan beberapa rancangan undang-undang, terutama terkait dengan Otonomi Khusus dan pembentukan provinsi-provinsi baru. Reformasi pelayanan hukum di Mahkamah Agung terbukti telah meningkatkan kualitas penyelesaian perkara. MA terus mengedepankan keadilan restoratif. MA juga telah meningkatkan akses pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Mahkamah Konstitusi telah meningkatkan pelayanan penegakan konstitusi secara efektif. Sistem peradilan berbasis elektronik semakin memudahkan akses masyarakat. Peran MK sebagai tuan rumah Kongres MK sedunia, juga patut diapresiasi. BPK telah menjaga sinergi antara kualitas tata kelola keuangan negara dan fleksibilitas dalam menghadapi krisis. Ini sangat membantu Pemerintah. Rencana penyelenggaraan Supreme Audit Institution (SAI)-20 juga semakin memperkokoh kepemimpinan Indonesia di G20.

Komisi Yudisial terus memberikan layanan prima dalam mengawal peradilan yang bersih dan berwibawa. Penanganan laporan masyarakat terkait lembaga peradilan telah membantu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga nasional yang lain sesuai wewenang dan perannya. Terima kasih kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia, dan juga kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, juga kepada Komnas HAM dan Lembaga-lembaga nasional lainnya.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Saya tegaskan kembali bahwa kita harus selalu waspada, selalu hati-hati, dan selalu siaga. Krisis demi krisis masih menghantui dunia. Geopolitik dunia mengancam keamanan kawasan. Kita harus selalu "Eling lan Waspodu", harus ingat dan waspada. Kita harus selalu cermat dalam bertindak. Kita harus selalu hati-hati dalam

melangkah. Saya tegaskan kembali. Agenda besar bangsa tidak boleh berhenti. Langkah-langkah besar harus terus dilakukan. Ada minimal 5 agenda besar yang tadi telah saya tekankan. Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu, mendukung agenda besar bagi pencapaian Indonesia Maju. Dengan komitmen dengan kerja keras, dengan inovasi dan kreativitas. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan.

Aamiin YRA. Marilah kita bersatu padu, untuk Indonesia Maju. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dirgahayu Republik Indonesia! Dirgahayu Negeri Pancasila! Merdeka! Terima kasih. Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namu Buddhaya.

Dan sebagai tambahan, baju adat yang saya kenakan ini adalah baju pakaian Paksian berasal dari Provinsi Bangka Belitung. Motifnya motifnya bernama pucuk rebung yang melambangkan kerukunan dan warna hijau yang kita pilih karena mengandung filosofi kesejukan, harapan, dan pertumbuhan. Terima kasih.

KETUA DPR RI (Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI)

Saudara Presiden dan saudara Wakil Presiden, hadirin peserta sidang yang terhormat dan seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Presiden Republik Indonesia yang telah menyampaikan pidato tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara, sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, untuk mengakhiri sidang pada pagi hari ini, kami mempersilahkan Saudara Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, MA untuk bisa membacakan doa.

IMAM BESAR MASJID ISTIQLAL (PROF. Dr. K.H. NASARUDDIN UMAR, M.A.)

Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirobbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi niamahu wayukafi mazidah allahumma yaRabb rabbanalakalhamdu kamayambagiljalali wajhikal kariim najimil sulthonik allahumma sholli wassalim allasayyidinna habibina wa syafiina wa maulana muhammadinin shallalohu alaihi wassalam, allahumma bariklana fii hadzal majlis biridho wabariklana alla mayaf alwajiasad sidinik warfa darajatana wayasir umurana wakbilidomana birahmatika ya arhama rohimin allohumma haqohaqa warjukna tiba'a wadina tilaba tilaba warjukna tinaba.

Ya allah ya rahman ya rahim dari lubuk hati kami yang paling tulus. Kami memanjatkan syukur kehadiran-Mu karena pagi hari ini bisa menyelenggarakan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2022 sebuah tradisi kenegaraan tidaklah memaknai proklamasi kemerdekaan kami. Ya Allah ya hamid ya syakhur, kami juga bersyukur senantiasa mendengarkan doa dan menghargai jerih payah dan ikhtiar segenap anak bangsa kami. *Alhamdulillah*, Covid-19 sudah melemah, inflasi masih terjaga, ketahanan pangan masih terkendali, dan stabilitas keamanan

nasional masih terpelihara sebagaimana yang disebutkan presiden kami barusan. Kami betul-betul memohon kiranya aku memelihara dan melindungi bangsa kami dan berbagai macam krisis global sebagai risiko geopolitik dunia yang semakin tidak menentu akhir-akhir ini. Ya Allah ya nasir Ya wah masih panjang jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami harus hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban, dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Berikanlah kekuatan dan ketegaran untuk mengemban amanah dan melewati berbagai tantangan tersebut. Kami yakin, seberat apapun cobaan dan tantangan itu. Jika kau hadir mendampingi kami maka semuanya menjadi ringan bagi kami. *Insyallah*, bangsa kami akan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.

Ya Allah ya hayyu ya kayyum limpahkanlah taufik dan hidayah agar kami dapat mengembangkan warisan amanah dan cita-cita luhur para pendiri bangsa kami, anugerahkanlah kekuatan persatuan dan jauhkanlah kami dari berbagai fitnah dalam bencana yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Perkuatlah ikatan tali kekeluargaan kami sebagai sesama anak bangsa agar bisa mewariskan bangsa yang tangguh kepada generasi penerus kami di dalam wadah tetap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya allah ya alim ya khabir bangsa kami diamanahi tugas mulia sebagai pemimpin G-20 tahun ini *insyaAllah* akan melangsungkan berbagai pertemuan penting di tengah berbagai tantangan. Kami mohon mudahkanlah semua urusannya dan anugerahkanlah pikiran-pikiran cerdas yang monumental yang bisa menjadi solusi terbaik berbagai persoalan dunia dan dunia kemanusiaan. Ya Allah yadu ya ghafur hamba-Mu sudah berikhtiar sedemikian rupa, selanjutnya sepenuhnya kami menyerahkan diri dan segenap ikhtiar kami kepada-Mu, ampunilah dosa dan segala kekeliruan kami para orang tua kami, para pemimpin dan para pahlawan kusuma bangsa kami kabulkanlah doa dan harapan kami. *Robbana atina fiddunya hasanah wafil akhiroti hasanah waqina adza banner walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA DPR RI (DR. (H.C.) PUAN MAHARANI)

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A. imam besar masjid Istiqlal yang telah membacakan doa kiranya Allah Subhanawataa'la Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan doa kira bersama aamiin. Saudara Presiden Saudara Wakil Presiden hadirin beserta peserta sidang yang terhormat seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI Tahun 2022 dan sidang bersama DPR RI DPD RI Tahun 2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin peserta sidang atas semua perhatian yang telah diberikan sehingga sidang ini dapat berlangsung dengan tertib dan lancar izinkan kami menutup sidang ini dengan ucapan dirgahayu Republik Indonesia sekali merdeka tetap merdeka wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh *Hom Santhi Santhi Hom Santhi Hom*.

KETUK PALU 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 11.30 WIB

SEKRETARIS RAPAT

Dr. MA'RUF CAHYONO, S.H., M.H.
NIP. 19670429 199503 1 001